

POSISI PERENCANAAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
DALAM MERANCANG PROGRAM BELAJAR
UNTUK "MEMBELAJARKAN" MASYARAKAT
DI INDONESIA

Disampaikan pada Pertemuan Diskusi Ilmiah
Jurusan PLS FIP IKIP Padang
Tanggal 20 Oktober 1990



OLEH :

DRS. JAMARIS M.Pd

MILIK UPT PERPUSTAKAAN IKIP PADANG	
DITERIMA TGL	JUNI 1991
SUMBER HARTA	HADIAH
KOL. KTI	KKI
NO. VE. TAPIS	1221 / HD / 91 - PD (3)
CALL NO	374 JAM PD

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
PADANG
1990

DAFTAR ISI

	hal
Daftar Isi	iii
Bab I. Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Pembahasan	4
D. Sistematika Laporan	5
Bab II. Perencanaan Pendidikan dan Pendidikan Luar Sekolah (PLS).	
A. Pengertian Perencanaan Pendidikan ..	6
B. Pengertian Perencanaan PLS	7
C. Tahap dan Pendekatan Perencanaan PLS.	9
Bab III. Proses "Membelajarkan" Masyarakat dan Posisi Perencanaan PLS dalam Merancang Program Kegiatan Belajar	
A. Konsep Andragogi Dalam Proses "Mem- belajarkan" Masyarakat	11
B. Langkah-langkah Perencanaan PLS Pada Tahapa Mikro	16
C. Merancang Program Kegiatan Belajar..	18
Bab IV. Penutup	
A. Kesimpulan	22
B. Saran-saran	23
Daftar Bacaan	24

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan pembangunan di Indonesia adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spritual berdasarkan Pancasila. Tujuan tersebut akan dapat dicapai dengan menggerakkan semua sektor pembangunan. Salah satu sektor pembangunan yang terpenting adalah pendidikan. Karena pendidikan langsung menyentuh aspek manusianya, baik sebagai subjek maupun sebagai objek pembangunan.

Tujuan pendidikan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, berbunyi : "... untuk meningkatkan ketakwaen terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tengah air, agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa " (GBHN, 1988:15). Dalam mewujudkan tujuan itu, pemerintah berusaha dengan berbagai cara untuk melaksanakan pendidikan nasional. Agar semua warga negara Indonesia dapat berkesempatan mengecap pendidikan, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945.

Dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah menyelenggarakan program pendidikan, baik yang berlangsung di sekolah maupun di luar sekolah. Penye-

lenggaraan ini tidak hanya dipikul oleh pemerintah saja, melainkan juga bersama-sama dengan masyarakat, antara lain pihak swasta.

Melalui pendidikan luar sekolah ditujukan untuk membantu masyarakat, terutama para populasi usia remaja keatas, baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja. Untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan mereka, hingga memungkinkan baginya untuk meningkatkan kualitas dirinya atau menciptakan lapangan pekerjaan.

Di Indonesia pelaksanaan pendidikan luar sekolah adalah "Pendidikan yang bersifat kemasyarakatan, termasuk kepramukaan, latihan-latihan ketrampilan dan pembrantasan buta huruf dikembangkan dan diperluas dengan mendayagunakan sarana dan prasarana yang makin di tingkatkan" (GBHN, 1988:47). Kemudian "pendidikan luar sekolah tidak terikat oleh tempat, waktu yang terbatas, fasilitas yang canggih kelompok usia tertentu. Keleluasaan ini, menempatkan pendidikan luar sekolah pada keuntungan yang lebih besar dibandingkan pada pendidikan formal (sekolah). Dalam arti penyesuaian terhadap perubahan tuntutan pada sektor-sektor pembangunan tertentu" (Fakry, 1987 : 4).

Dengan tidak terbatasnya umur (remaja keatas), yang digarap oleh pendidikan luar sekolah, maka cenderung di dalam proses belajar pendidikan luar sekolah, jarang sekali atau tidak sama sekali digunakan sistem belajar dan mengajar. Maksudnya adalah dalam pelaksanaan proses belajarnya

lebih banyak dititik beratkan pada konsep "membelajarkan". Konsep "membelajarkan" disini cenderung warga belajar juga dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Jadi tidak ada orang yang mengajar dan tidak ada pula orang yang diajar, seperti pelaksanaan pendidikan formal (sekolah). Melainkan saling belajar (memberi dan menerima) antara si tutor (guru) dengan warga belajar (siswa). maka konsep andragogi lebih banya berperan dalam pelaksanaan proses belajar dalam pendidikan luar sekolah.

Pembangunan pendidikan luar sekolah untuk "membelajarkan" masyarakat, memerlukan sumber dan fasilitas, baik dalam pemanfaatan sumber yang tersedia maupun fasilitas yang akan disediakan. Semua sumber dan fasilitas itu, perlu dikaitkan dengan tujuan, misi, arah dan orientasi pembangunan nasional di Indonesia. Untuk dapat dimanfaatkan, baik sumber yang ada maupun fasilitas yang akan disediakan secara efektif, efisien dan realitas, maka perlu dibuat suatu perencanaan dalam penggunaan dan penyediaannya. Tanpa perencanaan yang sistematis dan rasional upaya pembangunan pendidikan luar sekolah untuk "membelajarkan" masyarakat mustahil akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Perencanaan ini merupakan "alat" sebagai "pedoman dalam melakukan kegiatan" program, sehingga apa yang akan dicapai sudah diatur dan ditata terlebih dahulu.

Perencanaan yang baik merupakan salah satu tonggak keberhasilan dalam pelaksanaan program pendidikan luar se-

kolah di lapangan. Dengan perencanaan yang baik, akan dapat dirumuskan rancangan program yang efektif, agar lebih operasionalnya kegiatan yang akan dilakukan. Tanpa perencanaan yang baik, akan sulit dirumuskan rancangan kegiatan lebih konkrit. Untuk itu dalam makalah ini akan ditinjau tentang "Posisi perencanaan pendidikan luar sekolah dalam merancang belajar yang efektif untuk "mempelajari" masyarakat di Indonesia!"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan masalah umum yang telah dikemukakan diatas, maka berikut ini akan dirumuskan beberapa masalah dari masalah umum tersebut, yaitu :

1. Apakah pengertian perencanaan pendidikan ?
2. Apakah Pengertian Perencanaan Pendidikan Luar Sekolah ?
3. Bagaimanakah Tahap dan pendekatan perencanaan pendidikan luar sekolah ?
4. Bagaimanakah konsep andragogi dalam proses "mempelajari" masyarakat ?
5. Bagaimanakah langkah-langkah perencanaan pendidikan luar sekolah pada tahap makro ?
6. Bagaimanakah langkah-langkah merancang belajar yang efektif dalam proses belajar pendidikan luar sekolah ?

C. Tujuan Pembahasan

Adapun tujuan dari pembahasan makalah ini akan bertumpu pada jawaban pertanyaan atau rumusan masalah diatas, yaitu :

1. Pengertian perencanaan pendidikan.
2. Pengertian perencanaan pendidikan, luar sekolah.
3. Tahap dan pendekatan perencanaan pendidikan luar sekolah.
4. Konsep andragogi dalam proses "membelajarkan" warga masyarakat.
5. Langkah-langkah perencanaan pendidikan pada tahap makro.
6. Langkah-langkah merancang program belajar yang efektif dalam proses belajar pendidikan luar sekolah.

D. Sistematika Laporan

Dalam penulisan makalah ini terdapat beberapa urutan atau sistematikanya, yaitu :

- Bab I. mengemukakan tentang pendahuluan yang berkenaan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan pembahasan.
- Bab II. mengemukakan perencanaan pendidikan dan pendidikan luar sekolah, yang mencakup pengertian perencanaan pendidikan, pengertian perencanaan pendidikan luar sekolah, tahap dan pendekatan perencanaan pendidikan luar sekolah.
- Bab III. mengemukakan proses "membelajarkan" masyarakat dan posisi perencanaan pendidikan luar sekolah dalam merancang program belajar yang efektif.
- Bab IV. berkenaan dengan penutup, mencakup kesimpulan dan beberapa saran.

BAB II

PERENCANAAN PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (PLS)

A. Pengertian Perencanaan Pendidikan

Sebelum kita menelusuri pengertian tentang perencanaan pendidikan, terlebih dahulu marilah kita tinjau apa yang dimaksud dengan perencanaan itu sendiri. Sebagai dasar untuk penulisan selanjutnya, maka disini hanya dikemukakan beberapa pengertian saja, anatara lain seperti yang dikemukakan oleh M. Fekry Gaffar, yaitu " Perencanaan itu dapat diartikan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Keputusan-keputusan itu disusun secara sistematis, rasional dan dapat dibenarkan secara ilmiah karena menerapkan berbagai pengetahuan yang diperlukan " (1987:14).

Beranjak kita kepada pengertian perencanaan pendidikan, disini ada beberapa ahli yang mengemukakannya, yaitu antara lain seperti yang dikemukakan berikut ini :

" Educational Planning as a process contributing to policy decision-making has always existed in one form or another" (Reppraisal, 1983:12).

Selanjutnya menurut Beeby, bahwa : "perencanaan pendidikan adalah kegiatan memandang ke depan dalam menentukan kebijaksanaan, prioritas, biaya dan sistem pendidikan yang diarahkan kepada kenyataan ekonomi dan politis, untuk

nengembangan sistem itu sendiri dan untuk kebutuhan negara serta murid" (1984:6).

Dari dua pengertian itu, penulis akan menarik suatu kesimpulan pengertian yang relevan dengan permasalahan yang dikemukakan. Adapun yang dimaksud dengan perencanaan pendidikan adalah : suatu kegiatan memandang ke masa depan dalam bidang pendidikan yang mengutamakan nilai-nilai manusiawi, komprehensif, sistematis, berorientasi pada pembangunan, memanfaatkan sumber yang ada secermat mungkin dan dapat mengembangkan inovasi pendidikan.

Bertitik tolak dari pengertian itu, maka pembahasan selanjutnya tidak akan jauh berbeda dari apa yang telah dikemukakan tersebut. Hanya mungkin sedikit lebih mendalam yang berkenaan dengan perencanaan pendidikan luar sekolah dalam posisinya untuk merancang program belajar yang efektif dalam rangka "membelajarkan" masyarakat.

B. Pengertian Perencanaan PLS

Dalam uraian ini penulis akan mengemukakan pengertian perencanaan yang dikemukakan oleh Sutaryat, yaitu : "Perencanaan pendidikan luar sekolah adalah suatu paket kebijaksanaan untuk menggali dan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia yang lebih efisiensi untuk mencapai tujuan-tujuan sosio-ekonomi dan/atau sosio-kultural tertentu" (1982:2).

Dari pengertian tersebut, dapat ditarik beberapa unsur pokok yang menggambarkan proses perencanaan pendidikan



luar sekolah (PLS), yaitu :

1. Pernyataan yang jelas tentang tujuan.

Hal ini untuk mengetahui kebutuhan masyarakat dengan jelas. Karena kebutuhan itu bisa meliputi berbagai dimensi yang bebrbeda baik yang menyangkut nilai-nilai sosial, ekonomi, kultural, estetik dan lain-lain. Mungkin antara dimensi yang satu dengan yang lainnya dari suatu tujuan tidak dalam keadaan selaras, sehingga perlu ditetapkan prioritas. Dengan menetapkan prioritas, maka kebutuhan yang mendesak dapat menjadi tujuan yang utama, dan dapat diperjelas secara tuntas.

2. Survey tentang sumber-sumber.

Salah satu ciri dari PLS itu adalah memanfaatkan sumber yang ada, agar sumber-sumber tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Justru itu dalam merencanakan PLS, mensurvey tentang sumber-sumber ini sangat diperlukan.

Kemudian suatu survey tentang kebutuhan-kebutuhan pendidikan sangat penting untuk diselenggarakan supaya dapat dibuat rencana pemenuhannya sesuai dengan tujuannya. Hal ini perlu, guna memperhatikan kondisi dan kecendrungan yang ada. Kedalam survry ini termasuk assesmen alternatif, baik tentang kapasitas ataupun hambatan-hambatan politis, sosiologis dan administratif. Kesemua itu adalah untuk memudahkan dalam peleksanaannya nanti.

3. Pemaduan sumber-sumber dengan tujuan-tujuan.

Pemaduan ini merupakan hal yang penting sekali dalam

perencanaan PLS, karena dapat membangkitkan semangat belajar dari warga belajar. Ini dilakukan melalui koefisien keefektivan-relatif, Ini berarti membandingkan tingkat pengembalian atau keuntungan (pays-offs) dari alternatif-alternatif investasi.

4. Implementasi/peleaksanaan rencana.

Disini lebih menitik beratkan pada kegiatan yang akan dilakukan dalam perencanaan itu. Kalau perencanaan itu hanya berdasarkan perkiraan-perkiraan saja, tanpa membuat kegiatan yang akan dilaksanakan. Seringkali perencanaan itu sebagai formalitas saja. Tidak jarang rencana pembangunan yang di dalamnya terkandung rencana pendidikan, tetapi tidak menghasilkan sesuai dengan yang diharapkan, hanya karena para perencana gagal membuat persiapan yang memadai untuk implementasinya.

5. Evaluasi dan review.

Oleh karena suatu rencana berorientasi pada masa depan walaupun sulit namun memungkinkan untuk diramalkan. Sehubungan dengan itu perlu adanya review yang konstan, penyesuaian (adjustment) dan readjustment dalam kaitannya dengan perubahan dalam dinamika masyarakat. Untuk perencanaan PLS itu harus berkesinambungan.

C. Tahap dan Pendekatan Perencanaan PLS

Tahap perencanaan PLS ada dua tahap, yaitu tahap perencanaan makro dan tahap perencanaan mikro.

Tahap perencanaan makro melibatkan studi tentang sis-

tem yang terintegrasi dan lengkap tentang PLS, atau suatu bagian di dalam kerangka keseluruhan dari perencanaan pembangunan.

Tahap mikro melibatkan suatu analisis program-program atau lembaga-lembaga secara individual.

Mengenai pendekatan perencanaan PLS ada dua jenis, yaitu perencanaan PLS sebagai sub-sektor dari keseluruhan perencanaan pendidikan dan perencanaan PLS sebagai sektor independen, meliputi tujuan-tujuan yang bersifat sosial dan ekonomi.

Dipandang sebagai sub-sektor dari keseluruhan perencanaan ekonomi, perencanaan PLS berupa perencanaan ketenagakerjaan, sehingga kehilangan pengawasan yang penting terhadap potensialitasnya untuk perubahan sosial. Di lain pihak, dipandang sebagai sektor yang independen, perencanaan PLS memungkinkan untuk mewujudkan dua tujuan, yaitu perencanaan ketenagakerjaan dalam pengertian yang sempit dan pengaruh perubahan sosial.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

BAB III

PROSES "MEMBELAJARKAN" MASYARAKAT DAN POSISI PERENCANAAN PLS DALAM MERANCANG PROGRAM BELAJAR

Pada bagian ini akan dibicarakan tentang posisi perencanaan PLS dalam merancang program belajar yang efektif dan prosesnya untuk "membelajarkan" masyarakat. Sebagaimana telah dikemukakan pada bab pendahuluan bahwa merancang program belajar yang efektif dapat dilakukan apabila perencanaan yang dibuat terhadap program itu juga baik, dalam arti tidak bertele-tele. Karena semuanya akan bersumber dari perencanaan yang dibuat itu.

Seperti di Indonesia, merancang program belajar ini sangat penting sekali. Karena pada umumnya masyarakat kita pada umumnya yang berada di pedesaan belum sepenuhnya menghargai waktu dan potensi yang ada disekitar mereka. Untuk itu rancangan program belajar ini sangat penting sekali bagi para pelaksana program PLS di lapangan terutama yang bergerak di pedesaan Indonesia.

A. Konsep Andragogi Dalam Proses "Membelajarkan" Masyarakat.

Andragogi atau pendidikan orang dewasa berperan secara dominan dalam PLS. Apapun bentuk kegiatan tersebut, yang jelas haruslah memperhatikan prinsip-prinsip yang baik yaitu berlandaskan kepada konsep-konsep andragogi dalam

konsep "membelajarkan" masyarakat.

Menunjuk kepada yang dikemukakan Knowles, tentang "the andragogical process of program development" maka konsep andragogi dalam proses "membelajarkan" masyarakat melalui PLS hendaknya berpegang kepada tujuh langkah berikut ini, yaitu :

1. Menciptakan Iklim Belajar (the establishment of climate conducive to adult learning).

Situasi yang akan dijadikan tempat belajar, hendaknya diciptakan sedemikian rupa. Maksudnya, lokasi dan penempatan tempat belajar harus kondusif sebagai tempat belajar. Misalnya, tidak terlalu terpencil dari desa warga belajar tinggal, atau tidak terlalu dekat dengan keramaian, jauh dari polusi udara, mudah didatangi oleh warga belajar dan lain-lain.

Menurut Hamijoyo, mengingatkan bahwa "ada lingkungan tertentu yang dapat memberikan kemudahan dan menghalangi kegiatan belajar, seperti lingkungan fisik, lingkungan manusia dan hubungan antar manusia serta iklim organisasi" (1985:36).

Iklim belajar disini tidak hanya dimaksudkan dengan tempat situasi belajar, tetapi juga menciptakan iklim yang dapat membangkitkan motivasi untuk belajar sebelum dilaksanakan program belajar. Sebagaimana menurut Arief, bahwa "Katalog dan surat-surat pengumuman yang dikirimkan sebelumnya kepada peserta akan menciptakan iklim yang baik,

apabila katalog dan surat tersebut memberikan semangat dan citra serta harapan kepada pembacanya" (1986:61).

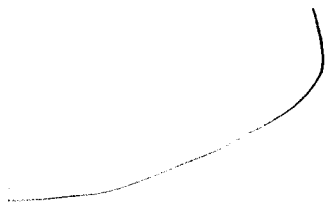
2. Menciptakan struktur organisasi (the creation of an organizational structural for participative planning).

Situasi yang ideal adalah mempunyai suatu kelompok, dimana dalam kelompok kecil ini semua peserta dilibatkan dalam setiap aspek perencanaan pada setiap fase kegiatan belajar. Dalam kelompok yang lebih besar hal serupa dapat dilakukan dengan membentuk sub-sub kelompok atau suatu panitia pengarah yang terdiri dari wakil-wakil dari sub-sub kelompok. Sementara peserta yang tidak duduk dalam panitia pengarah menjadi pengamat dan memberikan reaksi terhadap perencanaan yang dibuat oleh panitia pengarah tersebut. sudah barang tentu fasilitator tetap bertanggung jawab untuk memberikan kemudahan dalam perencanaan dengan menyarankan prosedur dan koordinasi dalam proses belajar tersebut.

3. Mendiagnosa kebutuhan (the diagnosis of needs for learning).

Ada tiga langkah yang perlu diikuti dalam proses mendiagnosis kebutuhan belajar dalam PLS, yaitu :

- Mengembangkan model tingkah laku yang diinginkan. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai jalan, diantaranya melalui penelitian, pertimbangan para ahli, analisis tugas dan partisipasi kelompok.
- Menilai tingkat penampilan seketang. Untuk menilai ini perlu diciptakan suasana yang hangat, membantu dan tidak



mengancam sejak permulaan dalam proses belajar.

- Menilai kesenjangan antara model dengan tingkat penampilan sekarang. Hal ini dilakukan agar peserta dapat menyimpan tenaga dalam meningkatkan penampilannya sesuai dengan model tingkah laku yang diinginkan.

4. Merumuskan tujuan belajar (the formulation of directions of learning --- Objectives).

Tujuan ini diperlukan agar dapat membantu fasilitator dan peserta/warga belajar dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi hasil pengalaman belajar. Tujuan belajar dalam PLS memberikan perhatian bagaimana membantu peserta dalam mengubah tingkah lakunya. Jadi tidak boleh dirumuskan menurut keinginan fasilitator saja. Untuk itu harus bekerja sama dengan warga belajar/peserta.

5. Mengembangkan suatu kegiatan belajar (the development of a design of activities).

Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam merancang kegiatan belajar, misalnya; dari yang sederhana ke yang kompleks (ada kontinuitas); dalam suatu susunan yang berurutan sampai akhir (ada urutan tertentu); dan dari keseluruhan bagian-bagian (integrasi). Namun apapun prinsipnya yang akan digunakan, yang penting adalah bahwa rancangan kegiatan belajar tersebut berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan dan prinsip-prinsip andragogi.

6. Melaksanakan kegiatan belajar (the operation of the activities).

Kegiatan belajar dalam PLS tidak menempatkan fasilitator sebagai guru (pengajar), melainkan sebagai pemberi saran, arah atau sebagai nara sumber. Oleh karena itu teknik yang mesti ditempuh harus yang mengarah pada partisipasi peserta secara penuh dalam keseluruhan kegiatan.

7. Evaluasi (the rediagnosis of needs for learning --- evaluation).

Pelaksanaan evaluasi dalam PLS hendaknya :

- sebagai siklus, yaitu dapat diulang dengan kecepatan yang telah meningkat. Jadi bukan evaluasi sebagai tahap akhir dari pelaksanaan program belajar, tetapi merupakan suatu fase atau tahap memperlebar siklus belajar itu sendiri.
- mencakup banyak aspek, yang meliputi pengukuran terhadap perubahan, harapan peserta sebelum program berlangsung, selama dan sesudah program itu selesai. Karena itu evaluasi harus mengantisipasi terhadap program selanjutnya, tidak hanya setiap selesai kegiatan tertentu dan hanya untuk aspek tertentu saja.
- Harus melibatkan peserta, agar para warga belajar, juga belajar menilai diri sendiri baik baik akan kesuksesan yang telah diperolehnya maupun kegagalannya.
- Sebagai umpan balik. Hal ini untuk menentukan program selanjutnya. Hal-hal yang sudah baik perlu dipertahankan dan lebih disempurnakan, sedangkan hal yang belum dapat dicapai dengan baik merupakan bahan masukan untuk diperhatikan dalam program belajar berikutnya.

WIP PADANG

B. Langkah-langkah Perencanaan PLS pada Tahap Mikro.

Berdasarkan konsep-konsep andragogi yang dikemukakan diatas dalam "membelajarkan" masyarakat, maka kita dapat membuat suatu perencanaan PLS secara mikro. Perencanaan PLS secara mikro, sebagaimana telah dikemukakan diatas (pada tahap-tahap perencanaan PLS), lebih mudah dari penyusunan perencanaan secara makro. Karena mengingat konsep-konsep andragogi yang telah dikemukakan, yaitu harus memperhatikan kebutuhan warga masyarakat setempat, itu antara lainnya.

Adapun langkah-langkahnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Sutaryat (1982:19-23), yaitu sebagai berikut :

Langkah 1 : Mendiagnosa keadaan daerah khusus tertentu.

Langkah ini untuk menentukan karakteristik daerah dan masyarakat setempat. Misalnya tentang budaya yang ada, keadaan pendidikan, sumber-sumber yang tersedia dan pola pembangunan yang ada serta status dan prospek pendidikan formalnya dan sebagainya.

Langkah 2 : Menentukan prioritas sasaran didik, kebutuhan dan tujuan belajar.

Langkah ini adalah untuk mengidentifikasi calon sasaran didik. Agar dapat tersusunnya perencanaan PLS yang efektif, maka calon sasaran didik harus dibagi dalam sub-sub kelompok yang fungsional. Masing-masingnya dengan peranan dan pengembangan khususnya serta kebutuhan belajar dari setiap sub-kelompok yang fungsional dari calon sasaran didik. Sehingga dapat dijadikan sumber untuk perumusan tujuan PLS.

MILIK DPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

Langkah 3 : Merancang sistem penyampaian pendidikan yang memadai.

Langkah ini adalah untuk mempertimbangkan keterbatasan sumber dan faktor-faktor penghambat yang mungkin timbul. Di dalam sistem penyampaian yang terbaik hendaknya sekedar memilih dari sejumlah prototybenya yang ada. Pendekatan yang baik adalah merancang dilapangan yang sesuai dengan kondisi khusus setempat.

Langkah 4 : Implementasi, evaluasi dan adaptasi yang terus menerus.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam langkah ini adalah :

- a. Penyediaan waktu yang cukup bagi perencanaan dan persiapan lebih lanjut.
- b. Hendaknya dibuat persiapan untuk evaluasi yang kontinue demi perbaikan dan peningkatan performance.
- c. Program hendaknya fleksibel, mudah diadaptasikan terhadap perubahan dan pengalaman-pengalaman yang diperoleh.

Langkah-langkah tersebut, perlu lagi dirumuskan secara lebih jelas dalam bentuk perancangan kegiatan belajar, agar belajar yang optimal sesuai dengan perencanaan dapat dicapai. Untuk itu berikut ini akan dikemukakan langkah-langkah merancang program kegiatan belajar yang efektif, sebagai pedoman dalam mengelola kegiatan PLS di masyarakat.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

C. Merancang Program Kegiatan Belajar.

Di muka telah disinggung bahwa untuk melaksanakan kegiatan belajar dalam PLS, terlebih dahulu harus ada rancangan kegiatan yang jelas dan konkrit. Agar setiap kegiatan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Rancangan ini tidak akan dapat dibuat dengan baik tanpa berpedoman pada perencanaan yang baik pula. Rancangan program kegiatan belajar, merupakan langkah untuk mengadakan pengelolaan kegiatan. Namun hal tersebut harus bersumber pada perencanaan yang baik. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diketengahkan langkah-langkah merancang program kegiatan belajar yang efektif.

Langkah 1 : Tentukan spesifikasi belajar yang akan dicapai.

PLS khususnya bertalian dengan belajar yang memiliki derajat kemanfaatan praktis, untuk itu pelaksanaan kegiatan PLS bukan dalam artian abstrak ataupun pemahaman teoritis, tetapi melainkan lebih banyak pada tujuan-tujuan praktis atau spesifikasi dari pembangunan. Sehingga manfaatnya dapat dirasakan sesegera mungkin untuk memenuhi kebutuhan sekarang.

Langkah 2 : Menentukan populasi sasaran.

Disini yang perlu diperhatikan adalah :

- Motivasi, sistem nilai dan sistem penghargaan dimana si warga belajar itu hidup/bekerja.
- Cognitive style dan kemampuan belajar dalam arti kemampuan yang telah dimiliki, dan

- Harapan mereka tentang belajar dan tentang lingkungan paedagogiknya.

Langkah 3 : Spesifikasi tugas pengajaran.

Hal ini untuk mempermudah pencapaian tujuan belajar. Agar warga belajar lebih banyak aktif/mencari/belajar sendiri untuk memnuhi kebutuhan belajarnya yang relevan dengan tujuan yang akan dicapai.

Langkah 4 : Spesifikasi tugas pendukung dan pengelolaan.

Tugas-tugas ini, adalah diluar tugas utama. Hal ini lebih banyak melibatkan sistem hardware serta pemeliharannya. PLS biasanya berlangsung pada satu dari dua arah berikut: 1) mempergunakan sumber-sumber hardware yang ada dan memasukkan pengajaran baru melalui saluran-saluran tersebut dengan sedikit perubahan; atau 2) membentuk sumber-sumber baru untuk dipergunakan sebagai saluran pengajaran.

Langkah 5: Spesifikasi tingkat peragaan untuk dipelajari.

Tingkat peragaan ini lebih banyak bertautan dengan dengan ketepatan, derajat atau kualitas dari pada ketrampilan yang ingin diperoleh atau yang diharapkan pada warga belajar.

Langkah 6 : Menyiapkan bahan pengajaran.

Penysunan dan penyiapan bahan-bahan pengajaran adalah serangkayan tugas yang ditentukan oleh keputusan sebelumnya, berupa spesifikasi tujuan belajar dan spesifikasi derajat peragaan yang perlu dipelajari. Dengan data populasi

sesaran dan tentang tujuan belajar seseorang perencana yang kreatif sudah dapat memikirkan berbagai cara yang berbeda-beda agar proses belajar itu dapat diselenggarakan.

Langkah 7 : Melatih sumber-sumber manusiawi.

Hal ini dilakukan agar mereka yang terlibat di dalam proses belajar itu dapat memahami apa dan bagaimana proses belajar itu berlangsung. Sehingga orang yang akan dijadikan sumber itu hendaknya mengetahui apa yang harus dia lakukan dalam menyampaikan bahan belajar yang telah dirancang.

Langkah 8 : Merencanakan prosedur evaluatif.

Gagal atau berhasilnya suatu sistem pengajaran biasanya bergantung kepada kemampuan untuk mengumpulkan data e evaluatif dan me-recycle rencana dan penyelenggaraannya (melaksanakan perubahan untuk pengembangan) atas dasar indikasi dari data evaluasi. Rencana untuk evaluasi mesti diselesaikan sebelum sistem dijalankan.

Langkah 9 : Menyelenggarakan sistem.

Penyelenggaraan sistem biasanya pada tahap pertama berupa eksperimen. Pada bulan-bulan permulaan dari penyelenggaraan itu, tujuan utamanya ialah mengumpulkan data evaluatif. Banyak sistem pengajaran yang direncanakan dan dengan baik dimulai secara "small scale" dimana karakteristik lingkungan warga belajar telah sangat dipahami.

Langkah 10 : Mengevaluasi belajar

Tujuan primer evaluasi ini adalah untuk memperoleh informasi yang dapat dipergunakan untuk melakukan "recycle

terhadap sistem". Usaha me-recycle ini berupa merubah (penyesuaian, perobahan, koreksi). Sistem pengajaran agar keefektiven belajar meningkat sebagai hasil sistem tersebut.

Dengan rancangan yang spesifik itu, maka kegiatan belajar akan dapat dilaksanakan dengan baik, namun masih banyak variabel lain yang mempengaruhi terlaksananya proses "mempelajar" masyarakat ini dengan baik. Seperti masalah dana, motivasi warga belajar, motivasi penyelenggara dan lain. Kemudian pada akhir makalah ini akan kami kemukakan berupa kesimpulan dan saran-saran untuk memperjelas rasi berfikir kita dalam memahami tulisan ini.

Dalam bagian ini akan dikemukakan kesimpulan dari tulisan ini dan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dalam penyelenggaraannya di lapangan.

A. Kesimpulan.

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan pendidikan adalah suatu kegiatan memandang ke masa depan dalam bidang pendidikan yang mengutamakan nilai-nilai manusiawi, komprehensif, sistematis, berorientasi pada pembangunan, memanfaatkan sumber yang ada secermat mungkin dan dapat mengembangkan inovasi pendidikan.
2. Perencanaan PLS adalah suatu paket kebijaksanaan ke masa depan untuk menggali dan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia yang lebih efisien untuk mencapai tujuan-tujuan sosio-ekonomi dan/atau sosio-kultural tertentu yang mempunyai nilai-nilai manusiawi.
3. Perencanaan PLS mempunyai dua tahap yaitu tahap makro dan mikro, sedangkan pendekatannya adalah ketenagakerjaan dan mempengaruhi perubahan sosial.
4. Sebagian besar dari warga belajar PLS adalah tingkat remaja keatas, maka dalam proses belajar lebih banyak menggunakan konsep andragogi, yang pada dasarnya lebih banyak memberi kesempatan untuk belajar atau mengeluar-

ken pendapat sendiri untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka.

5. Dalam proses "membelajarkan" warga masyarakat melalui PLS, lebih banyak didasarkan kepada kebutuhan warga belajar setempat, maka penggunaan perencanaan pada tahap mikro akan lebih tepat untuk memperoleh tujuan yang ingin di capai.
6. Posisi perencanaan PLS sangat penting sekali, untuk merancang program kegiatan belajar, tanpa perencanaan yang baik, rancangan program kegiatan yang baik akan sulit untuk dibuat.

B. Saran-saran

Adapun yang dapat penulis sarankan dalam penyempurnaan makalah ini, apabila dilaksanakan di lapangan adalah sebagai berikut :

1. Dalam membuat perencanaan hendaklah melibatkan semua instansi yang terkait, dalam arti lintas sektoral. Agar dalam melaksanakan kegiatan mereka yang dilibatkan itu akan merasa bertanggung jawab dalam kelancaran program itu.
2. Setiap perkembangan yang ada hendaknya selalu dievaluasi untuk/sebagai feedback dalam pelaksanaan proses belajar selanjutnya.
3. Sebelum diputuskan untuk dilaksanakan perencanaan itu hendaknya lebih banyak konsultasi dengan para ahli yang relevan dengan program pendidikan yang dilaksanakan.

DAFTAR BACAAN

Arif. Zainuddin, Andragogi, Angkasa, Bandung 1986.

Beeby. C.E., Planning and the Educational Administrator,
(terj. Istiwedayanti), Bharatara Karaya Aksara, Jakarta,
1984.

Coombs. Philip H., New Parth to Learning for Rurel children and Youth, (terj. PLSPO), Depdikbud, Jakarta,
1974.

-----., What is Educational Planning (terj. Bharatara), Bharatara karya Aksara, Jakarta, 1982.

Deppen RI., Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1988,
Jakarta, 1988.

Gaffar. Moh. Fakry, Perencanaan Pendidikan: Teori dan Metodologi, Depdikbud Dikti, P2LPTK, Jakarta, 1987.

Hamijoyo. Santoso S., Andragogi, Seri Benganter Pendidikan Orang Dewasa, BKKBN Nasional, Pusat Pendidikan dan Latihan Tenaga Program, 1985.

Knowlws, Malcom S., The Modern Practice of Adult Education Andragogi Versus Pedagogy, Association Press, New York, 1977.

Reppraisal. A., Educational Planning, Organization for Economic co-operation and Development, France, 1983.

T. Sutaryat, Perencanaan Pendidikan Luar Sekolah, FIP.IKIP, Bandung, 1982.